

Informasi APBN

2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan





Informasi **APBN** 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan

Disusun oleh

Tim Kementerian Keuangan

Editor:

Dit. Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Direktorat Jenderal Anggaran

Ide dan Konsep

Bayu Segara
Reza Ibnu Prakoso

Data yang digunakan dalam buku ini

2020-2022 : *LKPP Audited*
2023 : *Outlook APBN*
2024 : *APBN*

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya, Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2024 telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 16 Oktober 2023.

Peran strategis APBN semakin nyata terutama dalam periode mulai 2020 sampai dengan 2024. APBN menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan. APBN juga menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju, APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju. Strategi tersebut diwujudkan dengan komitmen untuk terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi lainnya. Di sisi lain rancang bangun APBN akan tetap diupayakan juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan - kebijakan yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan hingga buku Informasi APBN 2024 yang dikemas sederhana tetapi sarat informasi ini dapat terbit. Besar harapan kami buku ini dapat memberikan pencerahan mengenai APBN 2024 dan arah kebijakan pembangunan Indonesia.



Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan RI

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Fokus Kebijakan Fiskal 2024.....	8
Target Pembangunan	9
Asumsi Dasar Ekonomi Makro	10
Postur APBN 2024.....	11

BELANJA NEGARA 12

Belanja Pemerintah Pusat	14
BPP menurut fungsi	15
Belanja K/L	16
Anggaran Tematik	18
Belanja Subsidi	35
Transfer ke Daerah	36
DAK Fisik.....	37
DAK Nonfisik.....	38

PENDAPATAN NEGARA 39

Penerimaan Perpajakan.....	41
Penerimaan Pajak.....	43
Kepabeanan dan Cukai	44
Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	45

PEMBIAYAAN & DEFISIT ANGGARAN 46

Pembiayaan Utang.....	49
Pembiayaan Investasi	51
Pengelolaan Risiko Fiskal.....	52



Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk mendukung Tema kebijakan fiskal tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, digunakan strategi kebijakan jangka pendek dan jangka menengah panjang. Strategi kebijakan fiskal jangka pendek akan fokus pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Sedangkan untuk strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*).

Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, kebijakan fiskal tahun 2024 akan melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, meliputi sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.

Strategi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah tantangan ketidakpastian global.

Selanjutnya, peningkatan kualitas belanja (*spending better*) diarahkan guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (*fiscal buffer*). Kebijakan tersebut dilakukan baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam rangka menutup defisit anggaran dilakukan melalui langkah menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang.

Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable*, defisit anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,29% terhadap PDB.

APBN



Fokus

Kebijakan Fiskal 2024



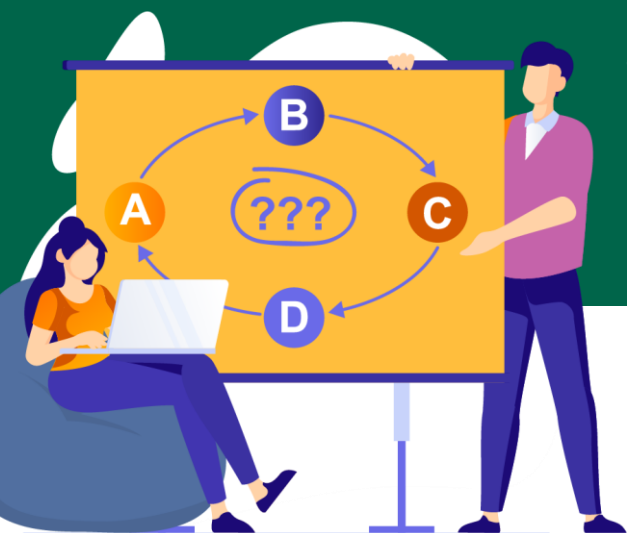
Melalui pengoptimalan fungsi distribusi dan stabilisasi APBN yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi.



Melalui pengoptimalan fungsi alokasi APBN yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*).

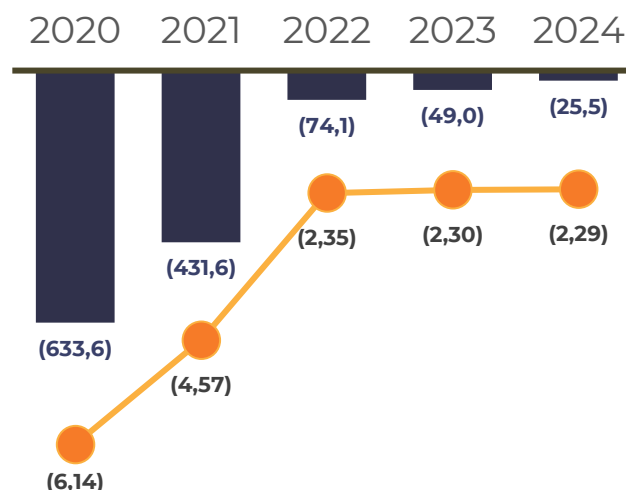


Melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, meliputi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (*fiscal buffer*), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang.



APBN 2024 mendukung konsolidasi untuk menjaga kesinambungan fiskal

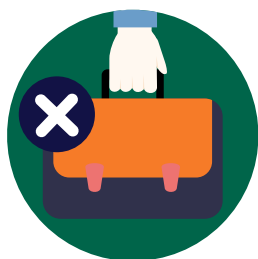
- Keseimbangan Primer (triliunRupiah)
- Defisit thd PDB (%)



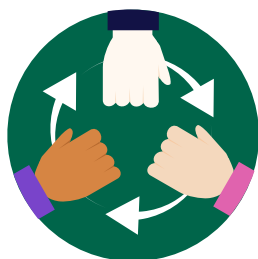
Informasi APBN 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Target Pembangunan 2024



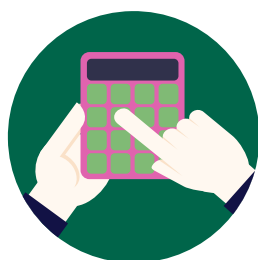
Tingkat Pengangguran (%)
5,0 – 5,7



Indeks Pembangunan Manusia
73,99 – 74,02



Tingkat Kemiskinan (%)
6,5 – 7,5



Gini Ratio
0,374 – 0,377



Kemiskinan Ekstrem (%)
0 – 1



Nilai Tukar Petani
105 – 108



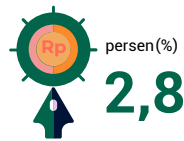
Nilai Tukar Nelayan
107 – 110

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024



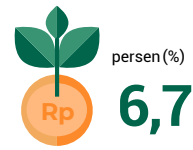
Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian ke depan



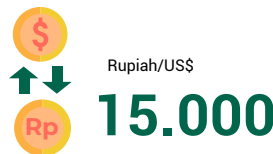
Inflasi

Laju inflasi tahun 2024 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi, dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai *shock absorber* serta daya beli masyarakat yang kuat



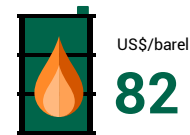
Tingkat Bunga SBN 10 Tahun

Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* akan menopang kinerja pasar SBN domestik



Nilai Tukar

Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah



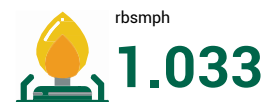
Harga Minyak Mentah

Pergerakan harga minyak di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan stok minyak mentah global akibat kebijakan pemotongan produksi oleh OPEC+



Lifting Minyak

Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan *giant fields* jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor



Lifting Gas

Pendapatan Negara

Rp2.802,3 T

Tumbuh 6,3% dari *Outlook* 2023 terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan

- **Perpajakan** Rp2.309,9 T
- **PNBP** Rp492,0 T
- **Hibah** Rp0,4 T

Belanja Negara

Rp3.325,1 T

Tumbuh 6,4% dari *Outlook* 2023 dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional

- **Belanja Pemerintah Pusat** Rp2.467,5 T
- **Transfer Ke Daerah** Rp857,6 T

Pembiayaan Anggaran

Rp522,8 T

antara lain :

- **Pembiayaan Utang** Rp648,1 T
- **Pembiayaan Investasi** Rp(176,2) T

Belanja Negara





Belanja Negara 2024

Belanja Negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global maupun domestik. Maka dari itu, belanja negara disusun agar dapat beradaptasi guna mendukung berbagai program pembangunan nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, belanja negara pada periode 2019-2023 telah diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Di tengah dinamika yang terjadi, APBN melalui belanja negara tetap menjalankan perannya sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2024 diarahkan untuk:

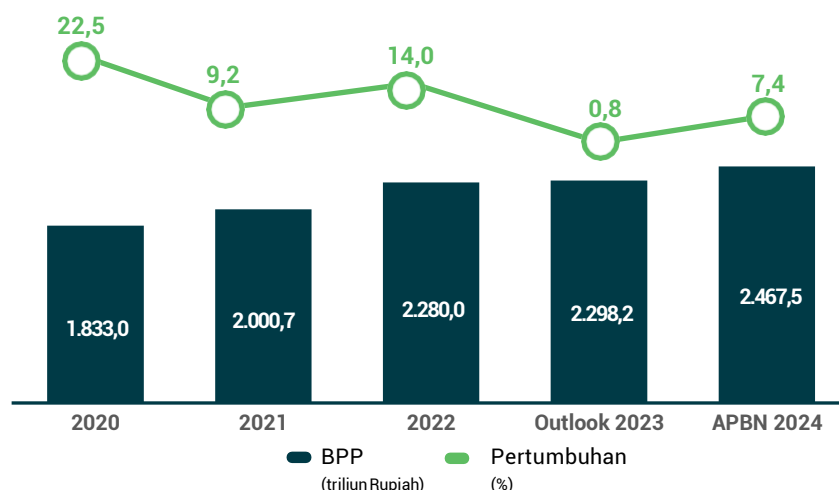
- (1) Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi,

- memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- (2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
- (3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintas melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
- (4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional; dan
- (5) penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

Belanja negara pada APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat

Mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja (*spending better*), mendorong subsidi tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan Pembangunan, dan pencapaian lapangan kerja



Belanja BPP Tahun 2024, tumbuh 7,4% untuk mengakselerasi transformasi ekonomi

Peruntukkan BPP antara lain:

- Pembangunan IKN
- Penyediaan anggaran subsidi (energi dan nonenergi)
- Kenaikan gaji pokok PNS dan Pensiunan
- Penuntasan Infrastruktur prioritas (a.l. PSN dan Inpres Jalan Daerah)
- Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024
- Pembayaran kewajiban pemerintah

Kebijakan a.l

- Mendukung percepatan transformasi ekonomi a.l. melalui:
 - a. penghapusan kemiskinan ekstrem
 - b. penurunan *stunting*
 - c. pengendalian inflasi
 - d. peningkatan investasi
 - e. penguatan kualitas SDM
 - f. percepatan pembangunan infrastruktur
 - g. mendukung hilirisasi SDA
- Penguatan *spending better* melalui efisiensi, fokus pada prioritas, dan berorientasi hasil
- Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintas
- Mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.



Informasi APBN 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

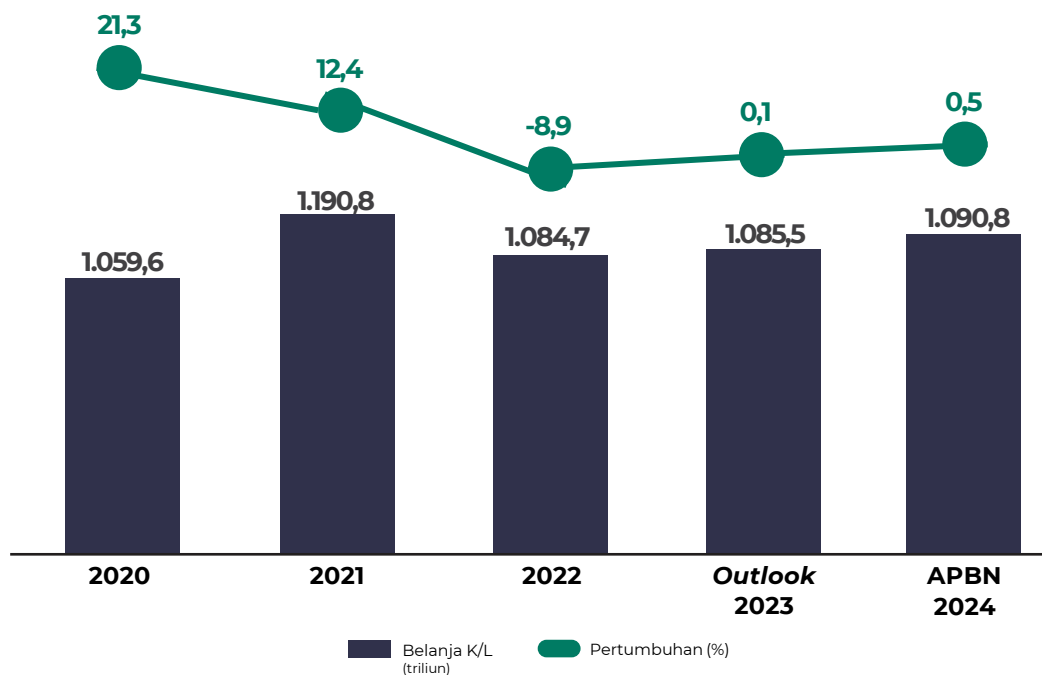


Belanja Kementerian/Lembaga

Rp1.090,8

triliun

Diarahkan semakin berkualitas (*spending better*) melalui belanja yang semakin efektif, efisien, transparan, fokus mendukung prioritas Pembangunan, dan akuntabel

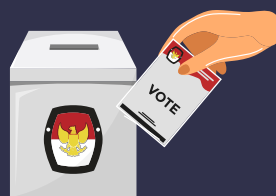


Melanjutkan pembangunan IKN

a.l Kemen.PUPR, Kemenkes, Polri, Kemenhub, OIKN

a.l untuk:

- Pembangunan sarana dan prasarana IKN
- Pembangunan RS IKN
- Pengamanan dan Almatsus pendukung IKN



Mendukung pelaksanaan pemilu

a.l KPU, Bawaslu, Polri, LPP TVRI, RRI

a.l untuk:

- Pembentukan Badan Adhoc
- Dukungan sarpras penyelenggaraan Pemilu
- Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih
- Pengamanan penyelenggaraan Pemilu



Menuntaskan PSN

a.l KemenPUPR dan Kemenhub

a.l untuk:

- Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas



Mendukung pertahanan dan keamanan

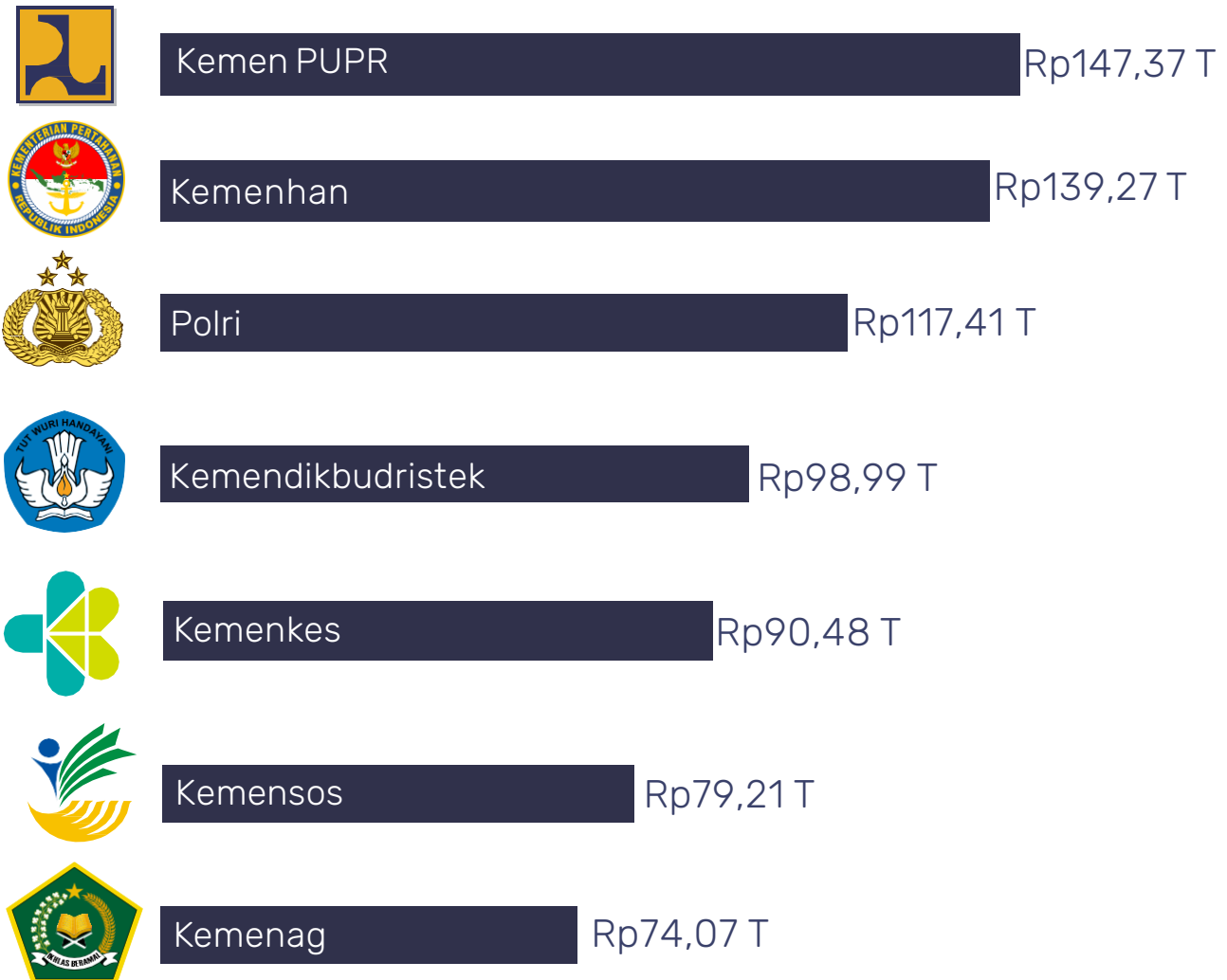
a.l Kemenhan dan Polri

a.l untuk:

- Penguatan stabilitas politik, hukum, dan keamanan

7 Kementerian/Lembaga

dengan Pagu Terbesar pada APBN 2024





Anggaran Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat menopang kehidupannya dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sejak tahun 2009.

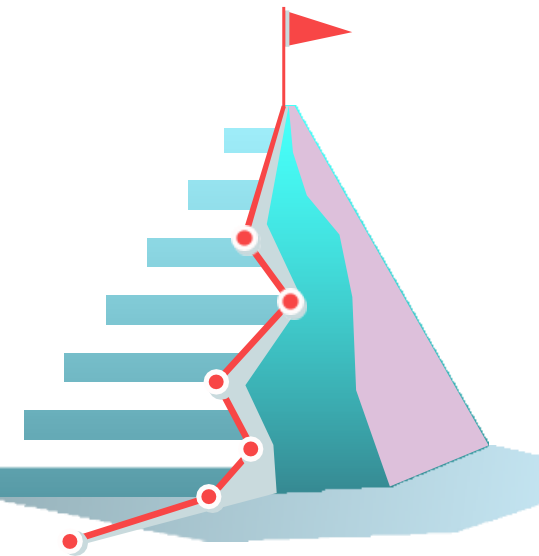
Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain melalui: (1) diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019; (2) perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; (3) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas;

(4) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; (5) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (6) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; dan (7) pelaksanaan program guru penggerak.

Selanjutnya, pada tahun 2024 pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan.

Anggaran Pendidikan

Tantangan Pendidikan Indonesia



Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang belum meningkat signifikan



Indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan negara sejawat (*peer countries*)



Masih tingginya pengangguran lulusan vokasi



Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN



Kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan



Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan



Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan Pendidikan

(antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan



Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik



Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa



Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui

penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan



Percepatan peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah

3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan



Peningkatan investasi di bidang pendidikan

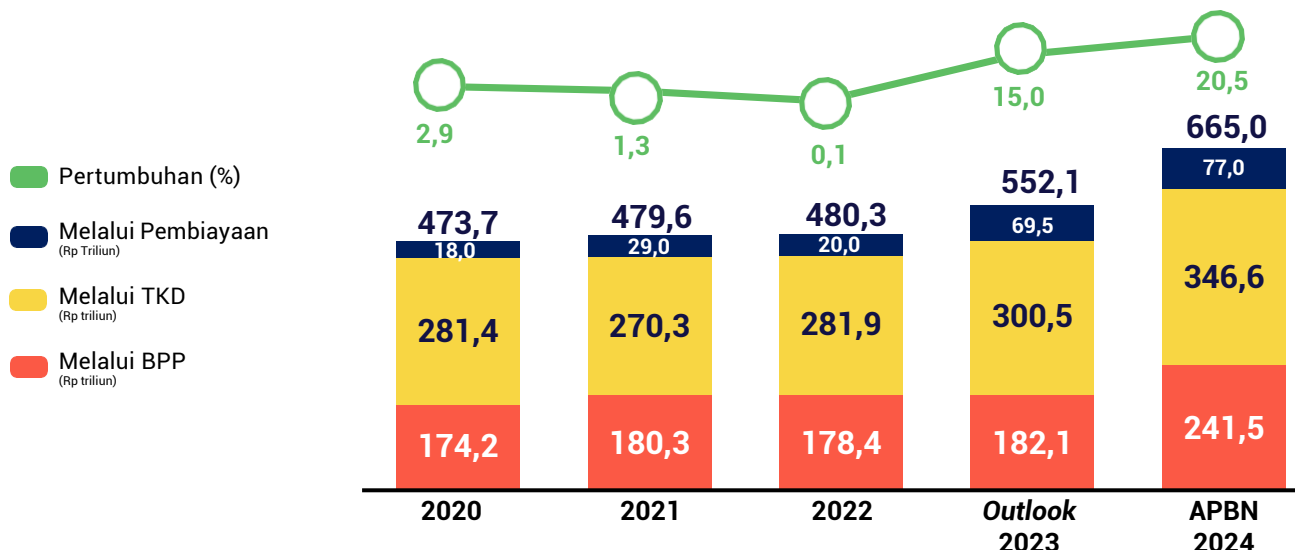
antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi

Anggaran Pendidikan

Rp665,0

triliun

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Anggaran Pendidikan tahun 2024, terdiri dari:

Rp241,5 T

Melalui Belanja Pemerintah Pusat, a.l.



PIP kepada 20,8 juta siswa
KIP Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa
TPG Non PNS untuk 577,7 ribu guru non PNS

Rp346,6 T

Melalui Transfer ke Daerah, a.l.

BOS untuk 43,7 juta siswa
BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik
BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 890,7 ribu peserta didik

Rp77,0 T

Melalui Pembiayaan, a.l.

Pemberian beasiswa :

- Beasiswa baru bagi 3.000 mahasiswa;
- Beasiswa *ongoing* untuk 3.120 mahasiswa.

Layanan pendanaan riset untuk:

- 28 riset baru;
- 47 riset lanjutan.





Anggaran Kesehatan

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5% dari APBN sesuai amanat UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Faktanya, pengalokasian anggaran di bidang kesehatan melebihi 5% dari APBN sejak tahun 2016, terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 s.d. 2023.

Dengan disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kewajiban pengalokasian anggaran kesehatan yang semula berdasarkan pada persentase tertentu dari APBN diubah menjadi berdasarkan rencana induk bidang kesehatan, sehingga sesuai dengan prinsip *money follow program* demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penganggaran dan pencapaian target di bidang kesehatan.

Pada tahun 2019–2022, realisasi anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 18,3%, yang tentunya juga diiringi oleh perbaikan *output* di bidang kesehatan. Pertumbuhan tersebut utamanya juga disebabkan oleh tambahan belanja penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 s.d. 2022 serta pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Selanjutnya, anggaran kesehatan tahun 2024 difokuskan untuk penguatan sistem kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan, yaitu transformasi layanan primer dan rujukan, ketahanan kesehatan, serta pembiayaan, SDM, dan teknologi kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan juga menitikberatkan pada upaya percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* serta penanganan penyakit katastrofik.



Anggaran Kesehatan

Akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan.

Tantangan Kesehatan Indonesia



- ☀ Pencapaian target nasional prevalensi *stunting* 14% pada tahun 2024
- ☀ Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran perlunya perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh di Indonesia
- ☀ Penyakit katastrofik yang masih tinggi,
- ☀ Ketersediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta pemerataan tenaga kesehatan
- ☀ Kemandirian sediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan
- ☀ Kesiapsiagaan terhadap risiko krisis kesehatan di masa depan.

Arah Kebijakan Kesehatan Indonesia

- ⊕ Percepatan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi
- ⊕ Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan
- ⊕ Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan
- ⊕ Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri
- ⊕ Penguatan program JKN dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan *stunting* dan kemiskinan.

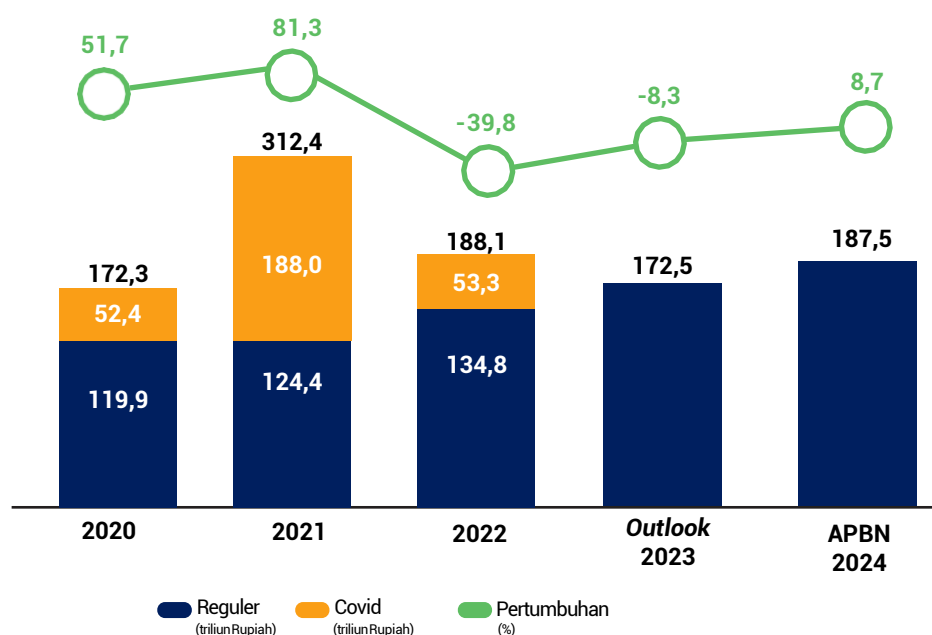


Anggaran Kesehatan

Rp187,5

triliun

Akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan.



Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan bidang kesehatan demi mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Anggaran Kesehatan 2024 sebesar 5,6% dari APBN dan tumbuh 8,7% dibandingkan *outlook* 2023 sehingga diharapkan target penurunan angka prevalensi *stunting* serta pelayanan kesehatan dan ketahanan kesehatan di Indonesia semakin membaik.

Target Output Prioritas

- Cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa
- Sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 57.738 sampel
- Penyediaan makanan tambahan bagi 45.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 100.000 balita kurus
- Pembangunan 9 RS Pratama
- Sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 1.200 orang
- Pembangunan/rehabilitasi 1.539 balai penyuluhan KB
- Penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 5.200 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 4.000 orang)
- Penyediaan puskesmas di 48 kecamatan dan peningkatan infrastruktur pada 12.234 puskesmas
- Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga
- Penyediaan bantuan operasional kesehatan untuk 10.074 puskesmas dan 545 daerah
- Penyediaan bantuan operasional KB untuk 6.229 balai penyuluhan KB



Anggaran Perlindungan Sosial

Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial (perlinsos) mampu mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19 serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Di tengah berbagai tantangan yang akan dihadapi di tahun 2024, Pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan program perlinsos untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM dalam jangka panjang.

Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merespons berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi, terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan. Perlindungan sosial juga

menjadi investasi jangka panjang guna mewujudkan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu modal dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada APBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan termasuk untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta menjawab tantangan yang ada, diantaranya melalui pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial lainnya.



Anggaran Perlindungan Sosial

Tantangan Perlinsos

- Masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bansos dan subsidi
- Efektifitas program di bidang perlindungan sosial mengalami penurunan yang dipengaruhi:
 - ✓ Proporsi nilai manfaat program terhadap pengeluaran rumah tangga yang cenderung menurun
 - ✓ Mekanisme dan ketepatan waktu penyaluran bansos yang tidak efisien



Arah Kebijakan Perlinsos



Perbaiki data dan penargetan program perlinsos melalui pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)



Penguatan perlinsos sepanjang hayat melalui penguatan program bagi lansia dan disabilitas serta perlinsos yang adaptif



Mendorong komplementaritas antarprogram dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos



memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui revaluasi secara berkala besaran manfaat program perlinsos



Penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan

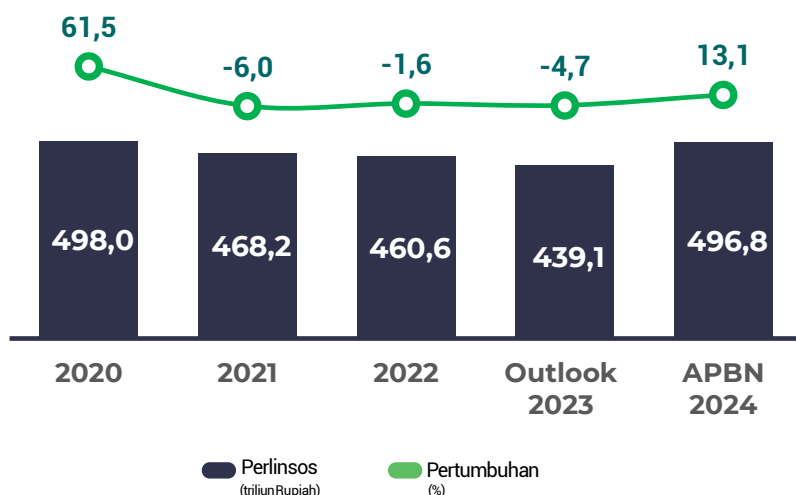


Anggaran Perlindungan Sosial

Rp496,8

triliun

Mempercepat Penurunan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan, dan Pembangunan SDM Jangka Panjang



Target Output Prioritas



Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta KPM



Program Bansos Sembako untuk 18,8 juta KPM



Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi 38,0 ribu anak, 32,6 ribu Lansia, serta 58,3 ribu penyandang disabilitas



Penyaluran bantuan iuran PBI JKN untuk 96,8 juta peserta



Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,8 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa



Penyaluran Subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter



Penyaluran Subsidi Bunga KUR untuk 6,09 juta debitur



Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM



Anggaran Infrastruktur

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yaitu Indonesia Maju, Pemerintah terus mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis dan prioritas yang mendukung transformasi ekonomi. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi fokus utama pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan sejalan dengan peningkatan kualitas belanja yang efektif dan efisien dalam rangka menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemenuhan infrastruktur dasar berupa penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta ketersediaan air minum dan sanitasi yang bersih dan berkualitas terus dijamin pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif.

Pembangunan infrastruktur didorong secara langsung dapat menggerakkan perekonomian, diantaranya melalui: (1) keberlanjutan pembangunan infrastruktur konektivitas, terutama yang mendukung peningkatan investasi; (2) pemenuhan akses energi dan ketenagalistrikan yang merata, andal, efisien, dan berkelanjutan, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), dan (3) penyediaan infrastruktur dibidang pangan yang mendukung ketahanan pangan.

Selanjutnya, penguatan dan pemerataan akses TIK terus dilakukan melalui penuntasan infrastruktur digital dan kebermanfaatan teknologi digital dalam mendukung ekonomi digital.

Pada tahun 2024 anggaran infrastruktur diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang difokuskan mendukung transformasi ekonomi untuk pemerataan pembangunan, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.



Tantangan

Pembangunan Infrastruktur



Pemenuhan layanan dasar

antara lain diperlukan penyediaan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan sanitasi yang bersih dan berkualitas, dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif.

Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

antara lain belum optimalnya pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan, serta perlu pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*).

Ketersediaan lahan

terutama kendala pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Prioritas lainnya

Infrastruktur konektivitas dan transportasi

antara lain diperlukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol dalam rangka pengembangan sistem jaringan jalan nasional, termasuk pengembangan jaringan transportasi (melalui peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan dan layanan angkutan laut, serta peningkatan prasarana perkeretaapian) yang terintegrasi dalam menghubungkan antar wilayah, serta mendukung KSPN dan Kawasan IKN.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

antara lain penuntasan infrastruktur digital dan pemanfaatan TIK yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat terutama di daerah 3TP, serta perlu optimalisasi layanan digital yang mendukung ekonomi digital, stabilitas layanan publik dan pemerintahan (SPBE).

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

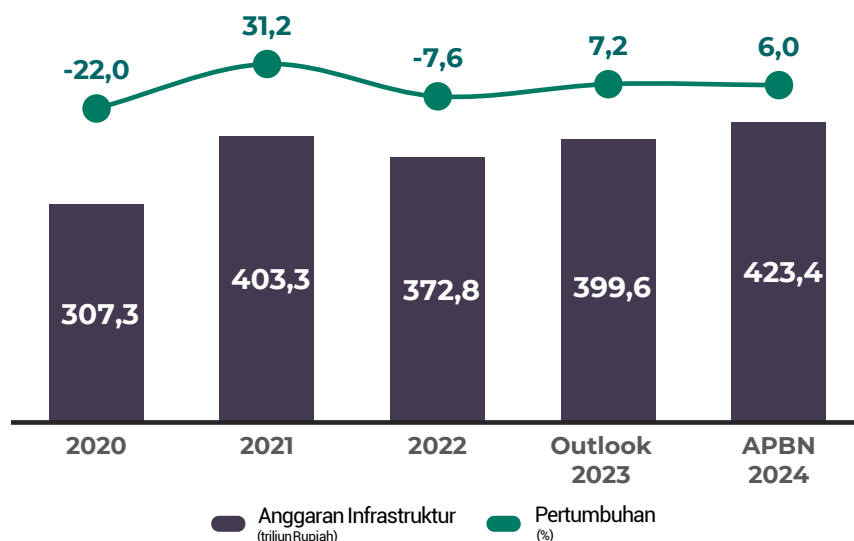
- ✓ Mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan);
- ✓ Memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis;
- ✓ Mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan;
- ✓ Melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan
- ✓ Mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur







Anggaran Infrastruktur

Rp423,4 T




Untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar








Layanan Dasar dan Pangan

-  Rumah Susun 5.479 unit, dan Rumah Khusus 553 unit
-  Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarpras Pendidikan dasar dan menengah 613 unit Sekolah
-  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.571 liter/detik
-  Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi masing-masing seluas 4.000 Ha dan 38.000 Ha




Energi dan Ketenagalistrikan

-  Pipa Transmisi Gas Bumi Tahap I (Ruas Cirebon – Semarang)
-  Pembangunan Bendungan 16 unit ditargetkan selesai
-  Bantuan Pasang Baru Listrik kepada 80.000 rumah tangga

Konektivitas dan Transportasi

-  Jalan baru 271,2 km; Jalan Tol Beroperasi 50,8 km; dan Konstruksi JTTS sepanjang 182 km
-  Jembatan baru 4.796,2 m; Flyover/underpass/terowongan 2.231,1 m
-  Panjang jalur kereta api kumulatif 7.451 km'sp
-  21 Lokasi bandara baru
-  36 Pelabuhan penyeberangan baru

Infrastruktur TIK

-  Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 62 unit
-  Penyediaan 22.709 Titik Akses Internet (Existing)
-  Operational proyek SATRIA (Kapasitas Satelit) sebesar 19 Gbps



Anggaran Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Kondisi tersebut tecermin dari tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutunya), aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak. Oleh sebab itu, pembangunan ketahanan pangan mempunyai peran vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri.

Namun, kondisi sektor pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal produksi pangan. Jika tidak disikapi dengan cepat dan cermat, kondisi tersebut dapat memengaruhi jumlah ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, sehingga akhirnya bisa berimbas pada inflasi pangan dan daya beli masyarakat. Untuk menghadapi tantangan kedepan, Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu bidang prioritas pembangunan dalam kebijakan transformasi ekonomi pada tahun 2024. Anggaran ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.



Anggaran Ketahanan Pangan



Tantangan

Hasil produksi pangan belum optimal, antara lain karena keterbatasan sarana prasarana produksi, alih fungsi lahan, keterbatasan SDM Pertanian, gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim (DPI), dan penyakit lainnya, termasuk wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, serta keterbatasan infrastruktur pangan.

Risiko terhambatnya rantai pasok pangan yang dapat memengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan, antara lain karena dinamika geopolitik, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca

Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan produksi domestik melalui penyaluran sarana prasarana produksi, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan DPI, penguatan riset, serta penguatan kapasitas petani/nelayan

Penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani, **dukungan pembiayaan** melalui subsidi dan bantuan lainnya, serta **perlindungan usaha tani** melalui asuransi pertanian

Percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan

Pengembangan kawasan Food Estate (Sentra Produksi Pangan)

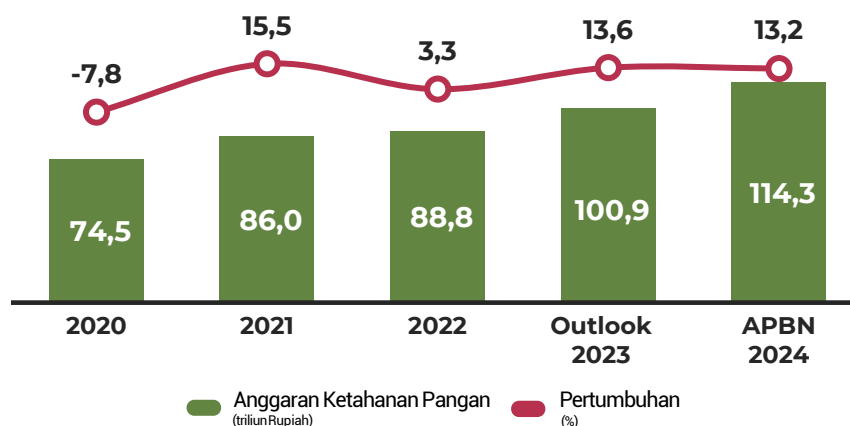
Penguatan cadangan pangan nasional



Anggaran Ketahanan Pangan

Rp114,3
triliun

diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan



Target Output Prioritas

- ✓ Kawasan padi seluas 304.000 ha
- ✓ Kawasan jagung seluas 90.000 ha
- ✓ Kawasan kedelai seluas 184.650 Ha
- ✓ Pengembangan 100 Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
- ✓ Bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 17.000 unit
- ✓ Bantuan sarana chest freezer (peti beku) sebanyak 300 unit
- ✓ Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan sejumlah 29.173 orang
- ✓ Rehabilitasi saluran tambak sebanyak 10 unit
- ✓ Pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 ha melalui pusat dan 25.328 ha melalui daerah
- ✓ Pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 23 unit dan bendungan baru sebanyak 1 unit
- ✓ Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 ha melalui pusat dan 96.779 ha melalui daerah
- ✓ Pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber air 3.573 unit
- ✓ Penyaluran subsidi pupuk 5,2 juta ton
- ✓ Pembangunan jalan pertanian 3.624 unit
- ✓ Pembangunan olahan pakan ternak 459 unit
- ✓ Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana
- ✓ 65 pelabuhan perikanan
- ✓ Pembangunan/rehabilitasi 184 balai benih
- ✓ Dana ketahanan pangan dan pertanian untuk 1.350 kelompok masyarakat



Anggaran Hukum dan Hankam

Pada bidang pertahanan dan keamanan, Pemerintah melanjutkan kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, antara lain tercermin dari kegiatan melanjutkan terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) agar menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024 Pemerintah menyiapkan arah kebijakan dan langkah antisipasi untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun 2024, antara lain pengamanan pelaksanaan Pemilu, penyiapan sarpras pendukung pengamanan Pemilu, penanganan sengketa perkara Pemilu, fasilitasi pengawalan Pemilu dan Pilkada, penegakan Kode Etik Pemilu, serta kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait daerah tertentu dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak.

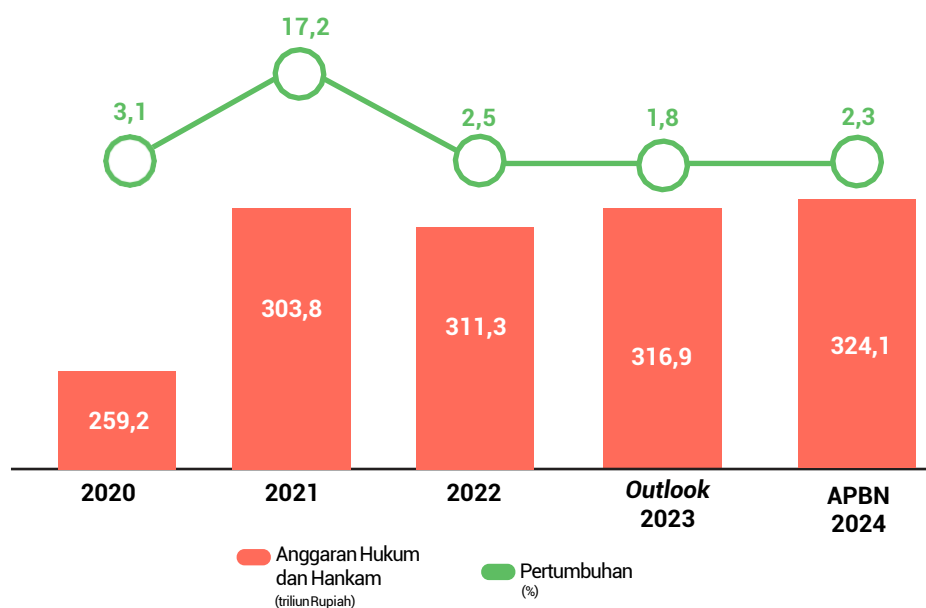


Anggaran Hukum & Hankam

Rp331,9
triliun

Kebijakan

- Dukungan pengamanan Pemilu 2024 dan IKN,
- pengadaan alutsista/almatsus/alpalhankam,
- Pemeliharaan dan perawatan alutsista/almatsus/alpalhankam,
- Pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam



Output Strategis antara lain



Harwat KRI, KAL, Alpeng dan Ranpur/Rantis Matra Laut



Pengadaan/penggantian pesawat udara



Pengadaan amunisi



Pengadaan/penggantian kendaraan tempur



Dukungan pengadaan alutsista



Penyelesaian tindak Pidana Narkoba



Patroli perbatasan dan wilayah laut



Penyelesaian Tindak Pidana Umum



Penyelesaian tindak Pidana Terorisme



Dukungan almatsus dan sarpras

Informasi APBN 2024

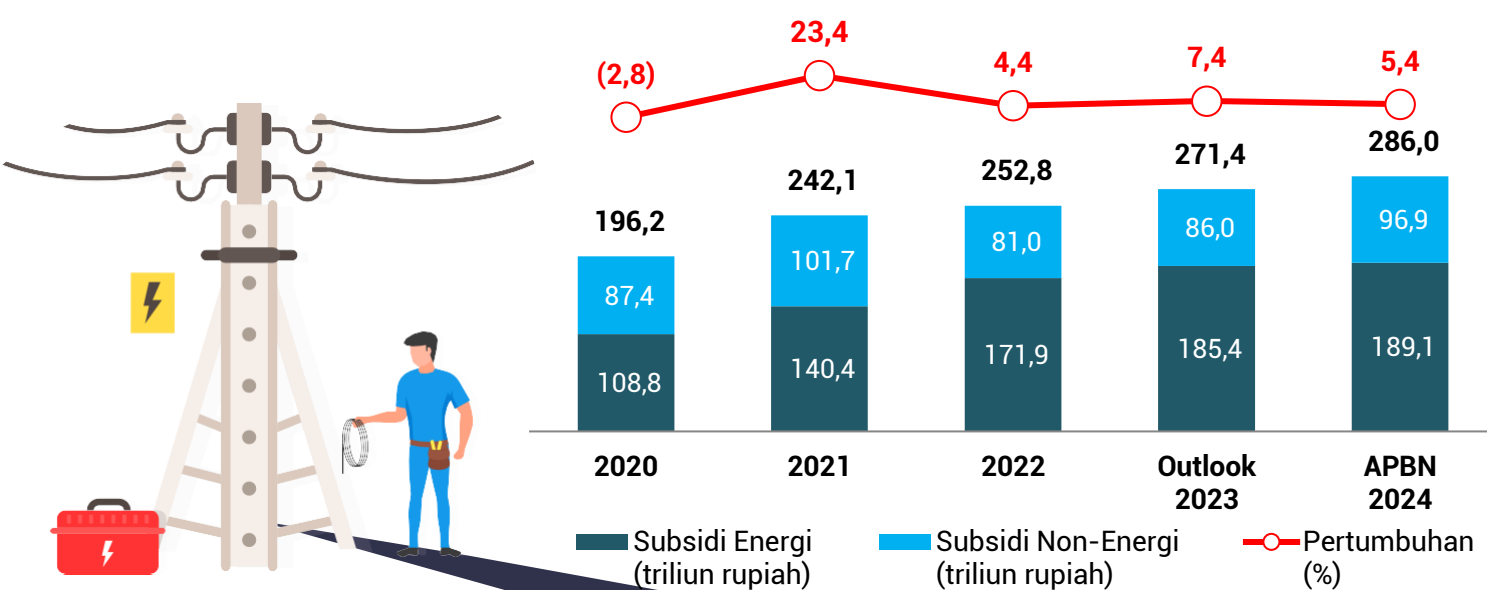
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Anggaran Subsidi

Rp286,0

triliun

Diarahkan Untuk Stabilisasi Harga dan Menjaga Daya Beli, serta Mendukung UMKM



Kebijakan Subsidi



Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah.



Memberikan subsidi listrik kepada golongan yang berhak.



Pupuk bersubsidi difokuskan untuk 3 jenis pupuk (urea, NPK, organik) serta penerapan skema bantuan langsung pupuk ke petani secara bertahap.



Mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik



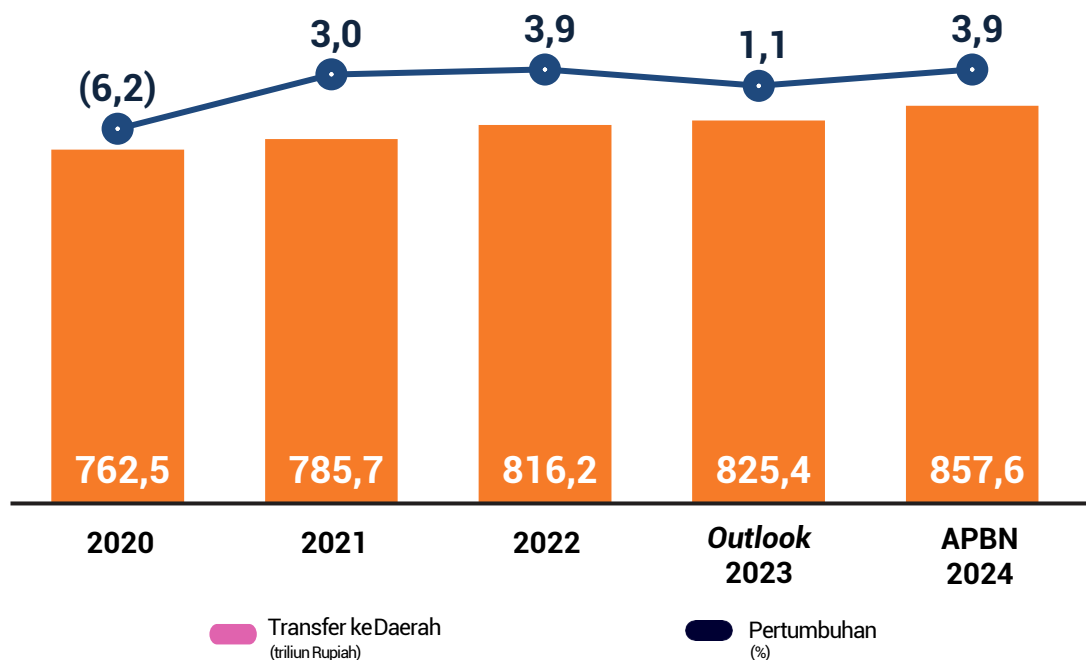
Memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR



Insentif perpajakan melalui subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah, sebagai stimulus kepada dunia usaha

Transfer Ke Daerah

diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan nilai sebesar Rp857,6 triliun



Kebijakan



Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.



Mendorong pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.



Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional



Menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai.



Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi *stunting*, kemiskinan, inflasi, dan investasi.



Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD



Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas.

Rencana Pencapaian DAK Fisik



Pendidikan

- Revitalisasi **11.721 Unit** Satuan Pendidikan
- Pembangunan **3 Unit** Satuan Pendidikan baru
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan **41 Unit**



Lingkungan Hidup

- Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6 m³ **158 Unit**
- Pengadaan Alat Angkut Sampah *Arm Roll* **63 Unit**
- Pengadaan Alat Angkut Sampah Motor Roda Tiga **155 Unit**
- Pengadaan *Early Warning System* Pengendalian Bencana di **31 Kab/Kota**



Pariwisata a.l

- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan di **49 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari) di **29 DTW**



Jalan

Penanganan Jalan dan Jembatan pada **37 Provinsi** dan **421 Kab/Kota**



Kelautan dan Perikanan

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana **65 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan di **61 Balai Benih Provinsi** dan **123 Balai Benih Kab/Kota**



Irigasi

- Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi **25.328 Ha**
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi **96.779 Ha**
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **4,766 km**



Transportasi Pedesaan

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis **278 km**
- Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung **3 Unit**



Kehutanan

- Penanaman Hutan Rakyat **2.217 Ha**
- Pembangunan Sumur Resapan **46 Unit**
- Pembangunan DAM Penahan **66 Unit**



Infrastruktur Energi Terbarukan

Pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid* **635 kW**



Kesehatan

- Penyediaan Puskesmas di **48 Kecamatan**
- Pembangunan RS Pratama **9 RS**
- Peningkatan Infrastruktur di **12.324 Puskesmas**
- Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan KB **1.539 Unit**
- Pengadaan Alokon **52 Unit**



Transportasi Perairan

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan **54 Pelabuhan**
- Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan **4 Unit**



Sanitasi

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat **11.906 SR**
- SPALD Setempat **7.793 SR**



Air Minum

- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan **146.675 SR**
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan **102.342 SR**
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **59.991 SR**



Perumahan dan Pemukiman

- Pembangunan Hunian Baru Layak Huni yang Terbangun sebanyak **2.174 unit**
- Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang terbangun sebanyak **116.371 m**



Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pembangunan **7 Pusat Layanan Usaha Terpadu** dan Revitalisasi **7 Pusat Layanan Usaha Terpadu**



Industri Kecil dan Menengah

- Pembangunan **6 Sentra IKM**
- Revitalisasi **52 Sentra IKM**



Perdagangan

Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata **2 Unit**



Pertanian

- Pengadaan/Rehabilitasi Sumber-sumber Air **3.573 Unit**
- Pembangunan Screen House Hortikultura **625 Unit**
- Pembangunan Unit Olah Pakan Ternak **459 Unit**
- Pembangunan Jalan Pertanian **3.624 Unit**

Rencana Pencapaian DAK Nonfisik



Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Meliputi 43,7 juta siswa untuk BOS Reguler dan 46.985 sekolah untuk BOS Kinerja



BOK

Untuk 10.074 Puskesmas



BOP PAUD

Untuk 6,2 juta peserta didik dan 3.644 satuan PAUD Penggerak



Dana PK2UMK

Untuk 46,2 ribu Peserta Pelatihan



Tunjangan Profesi Guru ASND

Untuk 943,3 ribu Guru PNSD dan 157,4 ribu Guru PPPK



Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

Untuk Sentra IKM pada 99 daerah



Tambahan Penghasilan Guru ASND

Untuk 124,3 ribu Guru PNSD dan 379,1 ribu Guru PPPK



Dana Pelayanan Kepariwisataaan

untuk 26,3 ribu peserta pelatihan



Tunjangan Khusus Guru ASND

Untuk 34,3 ribu Guru PNSD dan 16,6 ribu Guru PPPK



BOKB

Untuk 6.229 Balai Penyuluhan KB



BOP Pendidikan Kesetaraan

890,7 ribu peserta didik



Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan-Anak

Untuk 305 daerah



BOP Museum dan Taman Budaya

Untuk 109 museum dan 28 taman budaya



Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk 1.989 Kelompok Masyarakat



Dana Fasilitas Penanaman Modal

Pelaksanaan bimbingan teknis bagi 114,1 ribu pelaku usaha

Pendapatan Negara





Pendapatan Negara 2024

Sejalan dengan proyeksi perekonomian domestik yang disertai upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan iklim dunia usaha, **pendapatan negara** pada APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP.

Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai **Rp2.309,9** triliun atau tumbuh 9,0%. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan proyeksi ekonomi, efektivitas implementasi UU HPP, dan Peningkatan Kepatuhan Dan Integrasi Teknologi.

Meskipun perlu juga diwaspadai tantangan terutama risiko perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; serta perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, dan ekonomi hijau.

Selanjutnya **PNBP** ditargetkan sebesar **Rp492,0** triliun. Beberapa faktor yang akan memengaruhi PNBPN pada tahun 2024 adalah fluktuasi harga komoditas terutama minyak bumi dan batu bara. Sementara itu, kontribusi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan diproyeksikan meningkat.

Selanjutnya, target penerimaan **hibah** pada APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,4 triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (*Momemrandum of Understanding*).





Penerimaan Perpajakan

Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain fluktuasi harga komoditas, pandemi Covid-19, kebijakan Pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi global. Sebelum pandemi Covid-19, penurunan harga komoditas serta ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika-Tiongkok berimbas pada melambatnya penerimaan perpajakan di tahun 2019 yang hanya tumbuh **1,8%**.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memberikan tekanan cukup dalam terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pembatasan sosial. **Kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif membuat kinerja perpajakan tahun 2020 mengalami kontraksi 16,9%**. Upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional, membuahkan hasil positif secara bertahap. **Pada tahun 2021, kinerja perpajakan mampu rebound dan tumbuh positif sebesar 20,4%**.

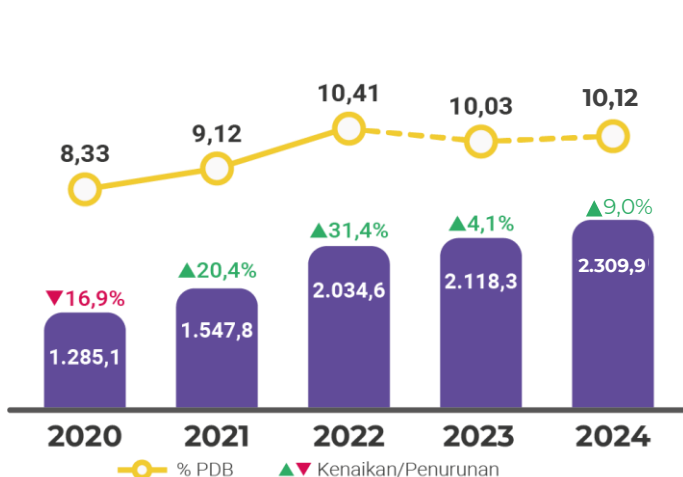
Kinerja positif pemulihan ekonomi dan implementasi UU HPP seperti program pengungkapan sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN mampu mendorong kinerja penerimaan perpajakan tahun 2022 bertengger di level **31,4%**. Selanjutnya upaya proyeksi perekonomian domestik dan upaya optimalisasi mendorong penerimaan perpajakan tahun 2023 yang diperkirakan akan masih mampu tumbuh **4,1%** di tengah gejolak ketidakpastian global.

Selanjutnya **penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai Rp2.309,9** triliun atau tumbuh 9,0% dari *outlook* tahun 2023 dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung antara lain proyeksi perekonomian domestik, tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan, perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum.



Penerimaan Perpajakan

Tumbuh 9,0%, Penerimaan Perpajakan 2024 diperkirakan Rp2.309,9 T



Kebijakan Perpajakan

- Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi
- Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- Menjaga efektivitas implementasi UU HPP
- Memperkuat sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum
- Insentif perpajakan semakin terarah dan terukur.

tumbuh
9,4%

Penerimaan Pajak

Dipengaruhi efektivitas implementasi kebijakan (UU HPP), risiko fluktuasi harga komoditas, dan *core tax administration system*



tumbuh
7,0%

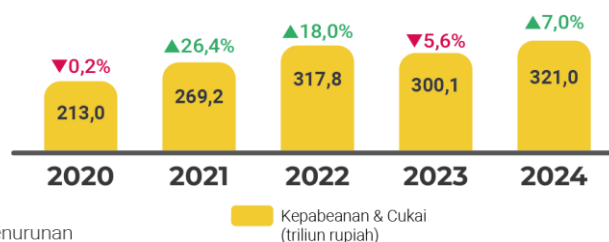
Kepabeanaan & Cukai

Dipengaruhi kebijakan tarif cukai hasil tembakau, aktivitas perdagangan internasional, dan harga komoditas terutama CPO

Penerimaan Pajak



Kepabeanaan & Cukai



Penerimaan Pajak

Rp1.988,9

triliun

Dipengaruhi efektivitas implementasi kebijakan (UU HPP), risiko fluktuasi harga komoditas, dan *core tax administration system*

Kebijakan Teknis, antara lain:

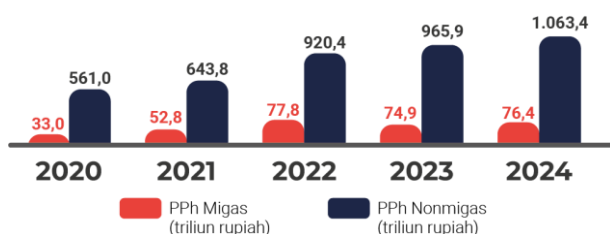
- ✓ Tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP;
- ✓ Ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan
- ✓ Fokus perencanaan penerimaan yang lebih terarah dan terukur (WP HWI, Grup, ekonomi digital)
- ✓ Implementasi *core tax system*
- ✓ Optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan;
- ✓ Pemanfaatan kegiatan *digital forensics*; dan
- ✓ Insentif fiskal yang terarah dan terukur.

PPH Migas

tumbuh 1,9%

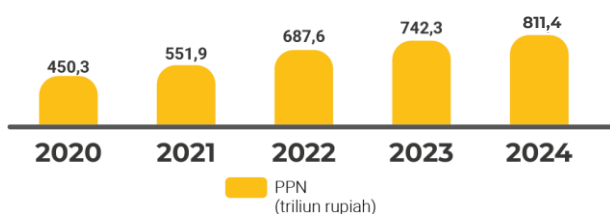
PPH NonMigas

tumbuh 10,1%



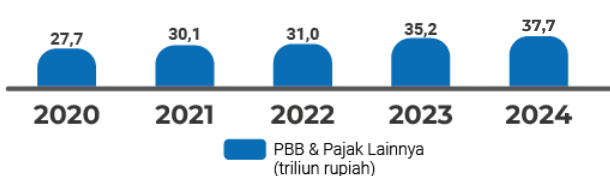
PPN dan PPn BM

tumbuh 9,3%



PBB & Pajak Lainnya

Tumbuh 7,3%

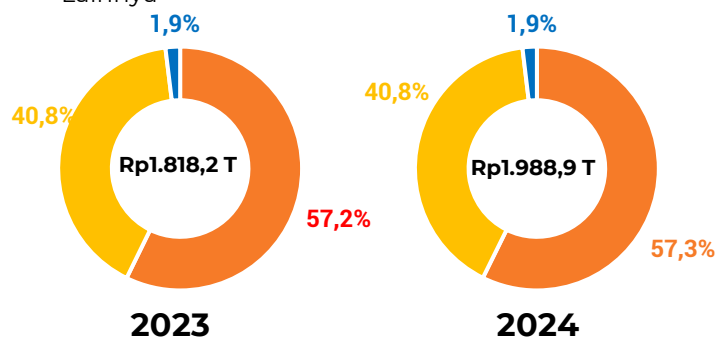


Informasi APBN 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kontribusi Per Jenis Pajak

■ PPh ■ PPN & PPn BM ■ PBB dan Pajak Lainnya



Penerimaan PPh, dipengaruhi:

Proyeksi pertumbuhan ekonomi
Perbaikan utilisasi tenaga kerja

Penerimaan PPN & PPnBM, dipengaruhi:

Peningkatan konsumsi domestik
Perluasan basis pajak

PBB dan Pajak Lainnya, dipengaruhi:

Objek pajak PBB-P3 dan fluktuasi harga komoditas
Peningkatan aktivitas transaksi bermeterai



Kepabeanan & Cukai

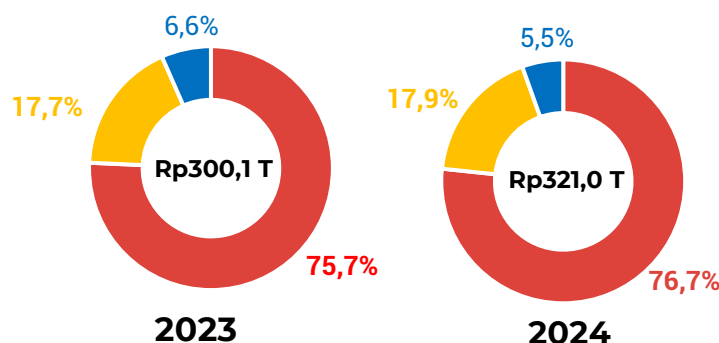
Rp321,0

triliun

Dipengaruhi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau, aktivitas perdagangan internasional, dan Harga Komoditas Terutama CPO

Kontribusi terhadap total Kepabeanan dan Cukai

- Cukai
- Bea Masuk
- Bea Keluar

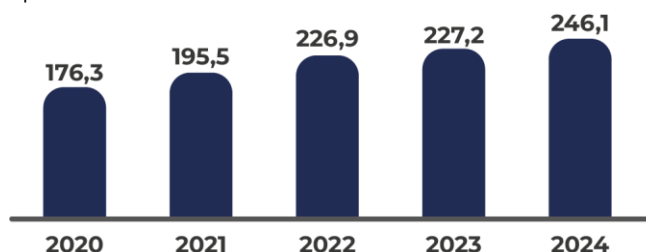


Kebijakan Teknis, antara lain:

- ✓ Intensifikasi/penyesuaian tarif cukai bersifat *multiyears*
- ✓ Ekstensifikasi/pemungutan objek cukai baru
- ✓ Pengembangan *smart customs and excise system*
- ✓ Peningkatan kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganan *transnational crime*
- ✓ Penyediaan insentif fiskal terutama UMKM
- ✓ Implementasi *National Logistic Ecosystems*
- ✓ Kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, & Pemda

Penerimaan Cukai Tumbuh 8,3 %

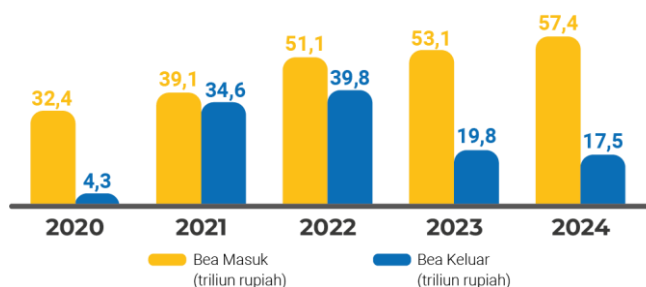
Penerimaan cukai mencapai Rp246,1 T (76,7% total penerimaan BC), tumbuh 8,3% didukung kebijakan tarif CHT dan Implementasi cukai produk plastik & MBDK



Pajak Perdagangan Internasional Tumbuh 2,7 %

Bea Masuk mencapai Rp57,4 T (17,9% total penerimaan BC), meningkat 8,1% dipengaruhi proyeksi aktivitas impor yang meningkat serta integrasi dengan *marketplace*

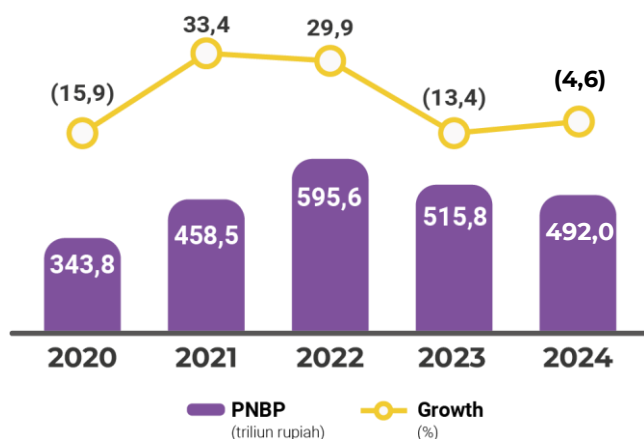
Bea Keluar mencapai Rp17,5 T (5,5% total penerimaan BC), dipengaruhi harga CPO dan kebijakan tarif produk mineral seiring progres hilirisasi SDA



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp492,0

triliun



Target PNPB 2024

dipengaruhi oleh:

- ✓ Fluktuasi harga minyak bumi
- ✓ Peningkatan *lifting* migas
- ✓ Moderasi harga batubara dan CPO
- ✓ Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) sektor minerba
- ✓ Dukungan kinerja BUMN

Kebijakan Umum PNPB 2024

- ✓ Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan dan tata kelola SDA
- ✓ Optimalisasi dividen BUMN disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN
- ✓ Peningkatan inovasi dan kualitas layanan K/L
- ✓ Penguatan pemanfaatan aset BMN
- ✓ Penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar
- ✓ Peningkatan sinergi dan perluasan teknologi informasi



Rp207,7 T

Pendapatan Sumber Daya Alam

Dipengaruhi normalisasi harga komoditas minerba terutama batubara serta optimalisasi *lifting* migas.



Rp115,1 T

Pendapatan PNPB Lainnya

Penjualan Hasil Tambang dan DMO dipengaruhi normalisasi harga komoditas minyak bumi dan minerba.

Optimalisasi PNPB K/L melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, pengelolaan aset BMN, serta peningkatan sinergi antarinstansi.



Rp85,8 T

Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan

Optimalisasi KND melalui penguatan tata kelola dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan kinerja BUMN.



Rp83,4 T


Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU sawit dipengaruhi normalisasi harga CPO.

Pendapatan BLU layanan didukung oleh peningkatan kemudahan akses layanan BLU dan sinergi antar BLU.

Pembiayaan Anggaran





Pembiayaan Anggaran untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat

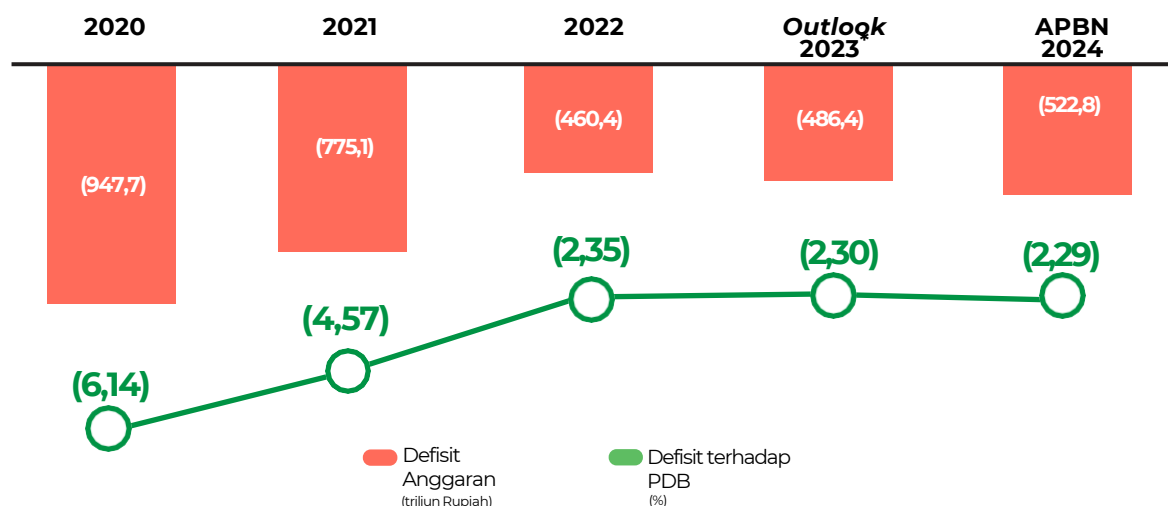
Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya target pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Implementasi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berkesinambungan.

Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*prudent*) dan masih berada dalam level selera risiko (*risk appetite*). Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung naik dari 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020 seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020. Namun sejak tahun anggaran 2021 dan 2022, defisit anggaran secara bertahap terus menurun sehingga menjadi 4,57 dan 2,35 persen terhadap PDB. Selanjutnya, mengingat tahun anggaran 2023 merupakan tahun konsolidasi fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, maka outlook defisit anggaran diperkirakan sebesar 2,30 persen terhadap PDB.

Kebijakan fiskal tahun anggaran 2024 didorong untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan masa lanjutan kebijakan konsolidasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2022.

Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Berkaitan dengan hal tersebut, maka defisit APBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp522.825,0 miliar atau sebesar 2,29 persen terhadap PDB.

Pembiayaan Anggaran



*) Defisit outlook 2023 memperhitungkan update perkiraan PDB 2023

- Mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi
- Mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*;
- Mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional
- Memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan
- Mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional
- Akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM
- Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema KPBU



Tantangan Pembiayaan Utang, a.l.

- Volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global
- Potensi *capital outflow* dari *emerging market*
- Potensi turunnya minat Investor
- Potensi kenaikan imbal hasil SBN

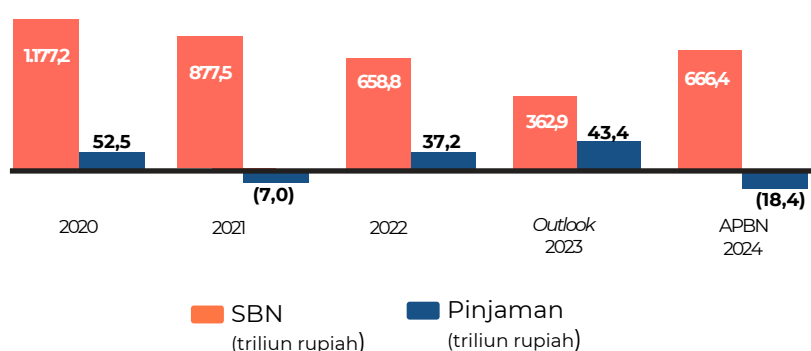
Tantangan Pembiayaan Investasi, a.l.

- Meningkatkan kinerja keuangan BUMN penerima PMN agar lebih sehat dan *profitable*
- Pembinaan BLU penerima PMN yang tersebar di berbagai K/L

Pembiayaan Utang

Rp648,1
triliun

Pembiayaan Defisit melalui Penerbitan SBN neto sesuai kebutuhan (*last resort*)



Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Utang

- Pengelolaan secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas *manageable*.
- Mengedepankan efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam (*deep*), aktif, dan likuid.
- Melakukan pinjaman diantaranya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang menambah aset, modal, ataupun alih teknologi.
- Menjaga portofolio optimal agar memiliki biaya dan risiko yang *manageable*.
- Memperluas basis investor dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Prinsip dan Strategi terkait Pengelolaan Utang

Prudent

Mengendalikan risiko utang dan mengelola utang dengan cermat dan hati-hati untuk mendukung konsolidasi fiskal dan sustainabilitas APBN

Keseimbangan Portofolio

Prioritas penerbitan SBN di pasar domestik untuk mengendalikan risiko

Fleksibel

Mengoptimalkan sumber nonutang
Memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas

Efisien

Pengembangan dan pendalaman pasar (termasuk mendukung penerbitan obligasi/sukuk daerah)



Informasi APBN 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



Strategi dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Utang 2024

- Pengelolaan pembiayaan utang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mendukung kesinambungan fiskal dengan cara mengendalikan biaya, risiko, dan rasio utang pada level yang aman, kredibel dan *manageable*.
- Mengoptimalkan potensi pendanaan dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap.
- Efisiensi biaya utang dan diversifikasi portofolio utang, antara lain melalui diversifikasi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang dan tenor, sehingga Pemerintah dapat memperoleh tingkat portofolio yang optimal.
- Mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN (baik konvensional maupun syariah) yang dalam (*deep*), aktif, dan likuid.
- Memprioritaskan penerbitan utang dengan tenor menengah-Panjang dan tingkat bunga tetap.
- Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.
- Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU.

Tantangan Pasar Keuangan dan Pembiayaan 2024

- Volatilitas pasar keuangan global yang masih berlanjut, normalisasi kebijakan moneter the Fed akan berpotensi menimbulkan pengetatan likuiditas global, dan potensi masih berlanjutnya *capital outflow*
- Potensi volatilitas pasar keuangan global juga akan berisiko meningkatkan imbal hasil SBN sebagai dampak dari peningkatan suku bunga UST dan inflasi global yang tinggi
- Pemulihan ekonomi domestik diperkirakan akan mendorong penyaluran kredit, sehingga peran perbankan dalam pembiayaan utang akan terbatas
- Kebutuhan *refinancing* utang pascapandemi hampir di semua negara mengakibatkan ketatnya likuiditas global dan domestik



Pembiayaan Investasi

Rp176,2

triliun

untuk infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan strategis lainnya

Kebijakan

PMN diberikan secara selektif, berdasarkan pertimbangan: sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

Atas usulan investasi dilakukan penilaian kelayakan pada 6 aspek yaitu: urgensi, legal, ekonomi, fiskal keuangan, lingkungan, dan sosial.

Sebagian investasi Pemerintah tahun 2024 akan dilakukan setelah dilakukan pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan



Klastering



Klaster Infrastruktur Rp55,2 T

Kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol

Penyediaan lahan untuk infrastruktur PSN

Dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)



Klaster Pendidikan Rp25,0 T

Peningkatan akses masyarakat pendidikan untuk keberlanjutan dan pengembangan pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren dan untuk pengembangan ristik)



Klaster Lainnya Rp96,0 T

a.l. untuk: Mendorong peningkatan ekspor nasional ke pasar global

Menjaga kelestarian lingkungan hidup

Memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional

Pengelolaan Risiko Fiskal

Tahun 2024

Risiko gejolak ekonomi global dan domestik serta perubahan kebijakan perlu diantisipasi sehingga pelaksanaan APBN berjalan optimal. Pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari Nota Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

RISIKO

MITIGASI, antara lain:



Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan APBN

Dampak asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi, jika terjadi kenaikan/penurunan akan berdampak terhadap fiskal

- Monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Analisis sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.
- Alokasi dana cadangan sebagai bantalan (*cushion*).



Risiko implementasi program dan kebijakan

- ✓ Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*
- ✓ Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi
- ✓ Program Pembiayaan Perumahan MBR
- ✓ Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara, Pembiayaan Utang

- Pemanfaatan alokasi *mandatory spending* agar memberikan outcome yang optimal
- Penguatan kerja sama dan kolaborasi, sinergitas dengan BUMN untuk percepatan eksplorasi.
- Peningkatan pembiayaan non-APBN, melibatkan pihak swasta untuk berpartisipasi.
- Efektivitas implementasi UU HPP
- Menjaga defisit sesuai dengan kaidah fiskal.
- Memprioritaskan sumber pembiayaan *domestic* dan *creative financing*.



Risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat

- ✓ Risiko Penjaminan
- ✓ Infrastruktur Pemerintah, BUMN dalam
- ✓ Pembangunan Infrastruktur, Jaminan Sosial, Penjaminan Program
- ✓ Pemulihan Ekonomi Nasional, Tuntutan Hukum kepada Pemerintah, Lembaga Keuangan Tertentu

- Pemantauan secara berkala
- *Transfer risk* (antara lain dana cadangan)
- *Risk sharing* dengan PT PII (Persero) sebagai *ring fencing* terhadap APBN



Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Risiko berkaitan aset dan kewajiban negara secara agregat yang meliputi entitas Pemerintah Pusat, Pemda-provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan BUMN

- Monitoring dan Penguatan koordinasi
- Implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- *Mendorong creative financing/blended financing*



Risiko Fiskal Daerah

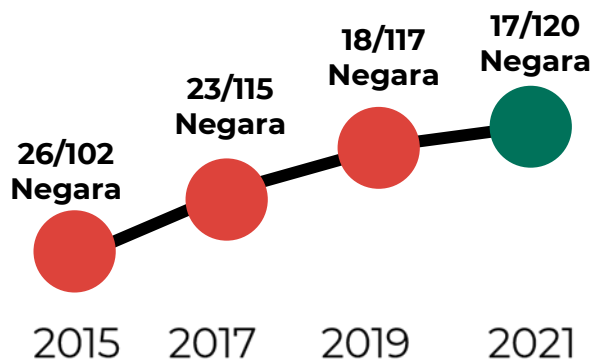
Risiko inefisiensi belanja daerah dan potensi lemahnya tata kelola belanja di daerah

- Harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah
- Kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja
- Penguatan kelembagaan

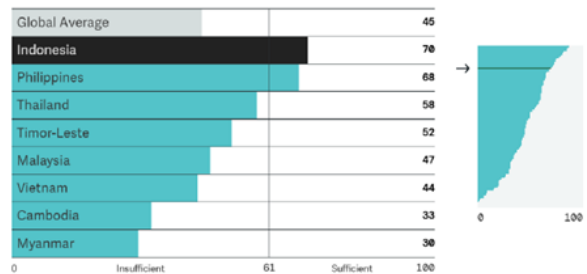
hai!

we need your opinion

Tahukah anda? Hasil penilaian Open Budget Survey (OBS) tahun 2021, Indonesia mendapat peringkat 17 dari 120 negara di dunia dengan skor 70. OBS diselenggarakan oleh International Budget Partnership.



International
Budget
Partnership



Buku Informasi APBN adalah salah satu indikator dari penilaian survei tersebut. Oleh karena itu, sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Buku Informasi APBN selanjutnya, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi survei pada tautan di bawah.

Scan here



bit.ly/surveiinformatiAPBN2024

terima kasih...

**Direktorat
Penyusunan APBN**

menuju Zona Integritas dan Wilayah
Bebas dari Korupsi

PRUDENT

Profesional, Responsif, Unggul,
Dedikatif, Efisien, No Korupsi, Transparan

Informasi APBN 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
www.anggaran.kemenkeu.go.id

